



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RISIKO PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN



FIGHT AGAINST
X-CRIME

Yazid Nurhuda, SH, MA
Direktur Penegakan Hukum Pidana

Direktorat Jenderal Gakkum,
KLHK

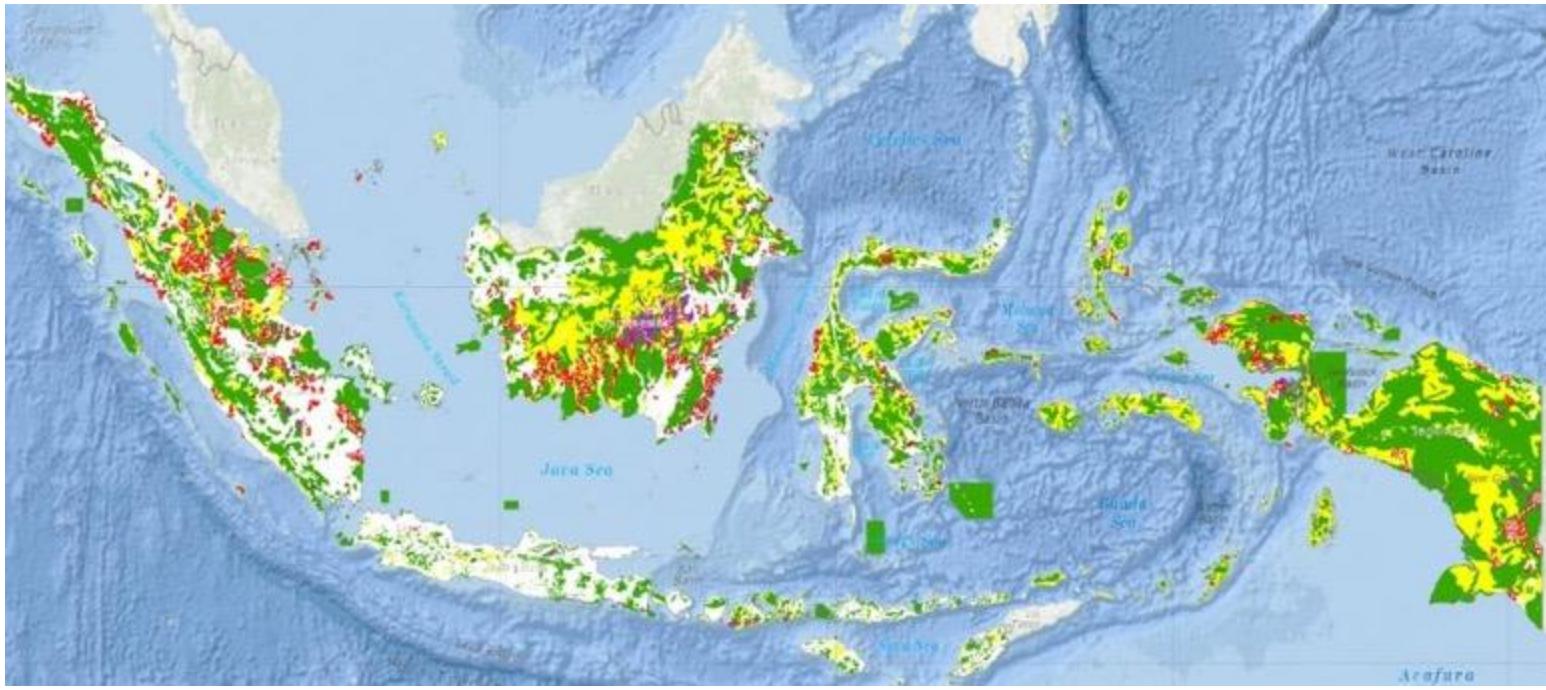


Jakarta



02 November 2020

KEKAYAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA



KETERANGAN

| | |
|--|------------------|
| | TAMBANG |
| | KEBUN |
| | KAWASAN LINDUNG |
| | KAWASAN BUDIDAYA |
| | APL |
| | BADAN AIR |

29.68 Juta Ha
Hutan Lindung

2.5 Juta Ha
Kawasan terumbu Karang

8,500 Spesies Ikan

555 Spesies Rumput Laut

950 Spesies Terumbu Karang

47,910 Spesies
Flora & Fauna

68.82 Juta Ha
Hutan Produksi

Perkebunan dan
Pertambangan

31,092,273 Ha
Area Konsesi di
Hutan Produksi

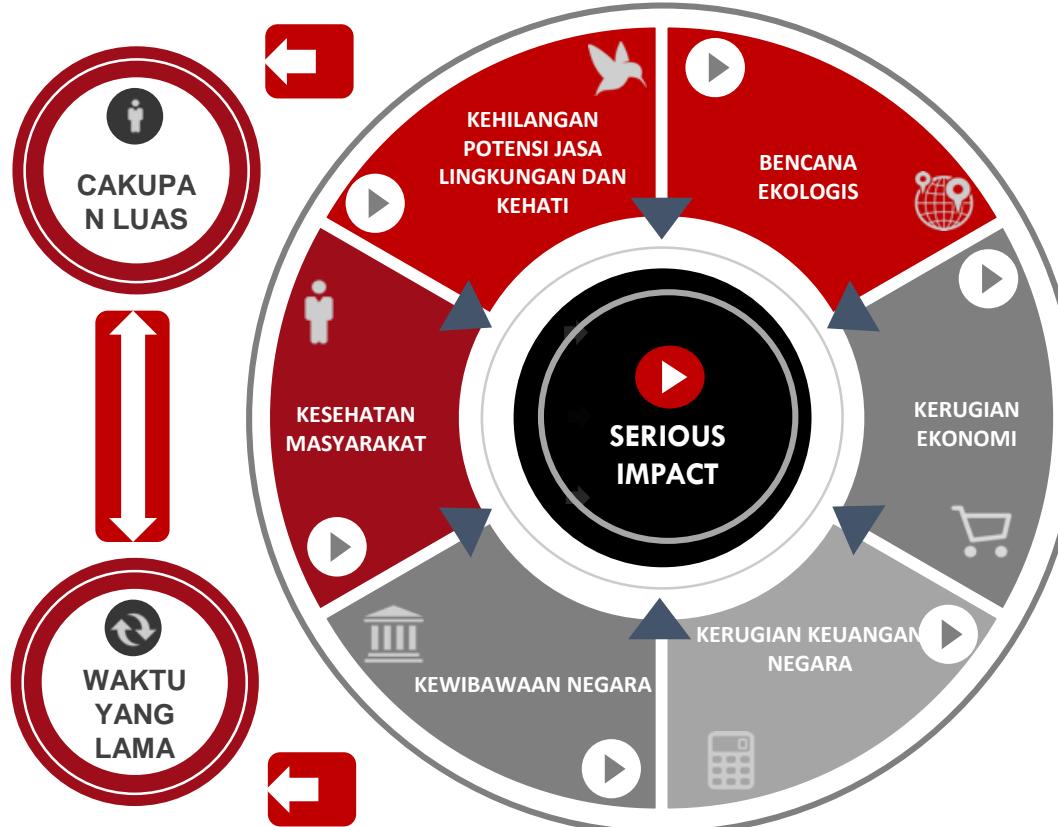
27.43 Juta Ha
Kawasan Konservasi

PROLOG: MENEGAKKAN HUKUM, MENSEJAHTERAKAN





I. DAMPAK DAN KARAKTERISTIK KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN



PELAKU KEJAHATAN



INDIVIDU



KORPORASI

KELOMPOK
TERORGANISASI

AKTOR
TRANSNASIONAL

ELIT POLITIK
BERPENGARUH

OKNUM
APARAT





II. PELUANG: INFRASTRUKTUR PENEGAKAN HUKUM

UU No. 5/1990
Konservasi SDA Hayati &
Ekosistemnya

UU No. 41/1999
Kehutanan

UU No. 18/2008
Pengelolaan Sampah

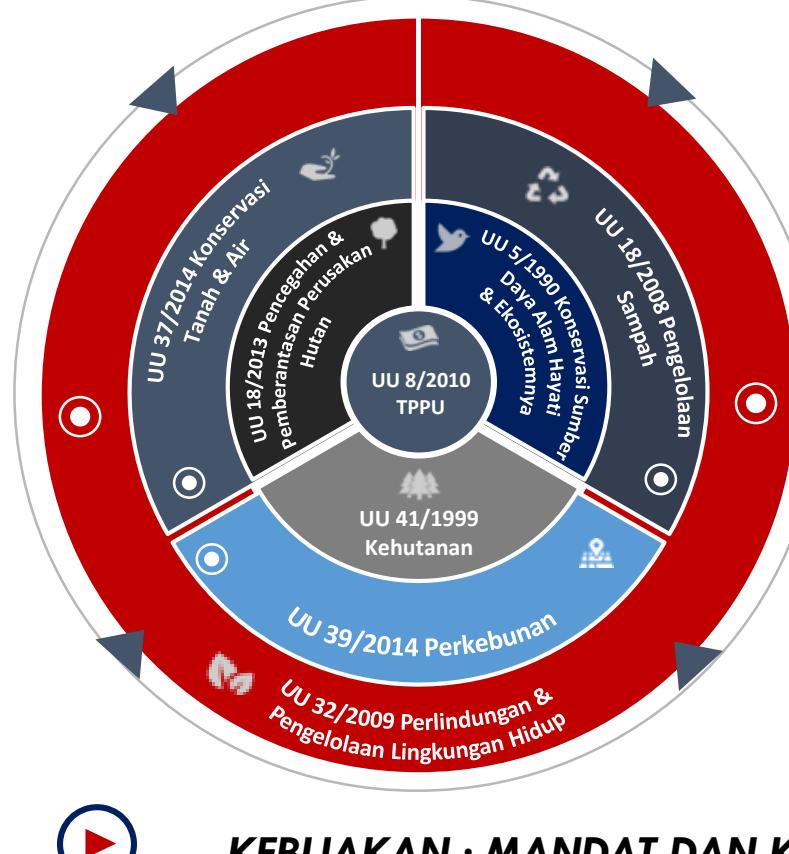
UU No. 32/2009
Perlindungan dan Pengelolaan
LH

UU No. 18/2013
Pencegahan & Pemberantasan
Perusakan Hutan

UU No.37/2014
Konservasi Tanah & Air

UU No. 8/2010
Pencegahan &
Pemberantasan TPPU

UU No. 8/1981
KUHAP



KEBIJAKAN : MANDAT DAN KEWENANGAN



TINGKAT
KEBIJAKAN



TINGKAT
KELEMBAGAAN



TINGKAT
OPERASIONAL

II. INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM



INSTRUMEN

PENCEGAHAN



INSTRUMEN
PENEGAKAN HUKUM



POLISIONAL &
PENGAWASAN



PENANGANAN PENGADUAN



SANKSI ADMINISTRATIF



PENYELESAIAN SENGKETA
LH



PENEGAKAN HUKUM
PIDANA

II. KOMITMEN PENEGAKAN HUKUM PIMPINAN NASIONAL



“ *Tindak tegas para pelaku illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing*

Presiden Joko Widodo

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2015

“ *Penegakan hukum harus betul-betul dilakukan, baik administrasi, perdata atau pidana... Ini harus dilakukan agar menciptakan sebuah kepastian hukum dan dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat*

Presiden Joko Widodo

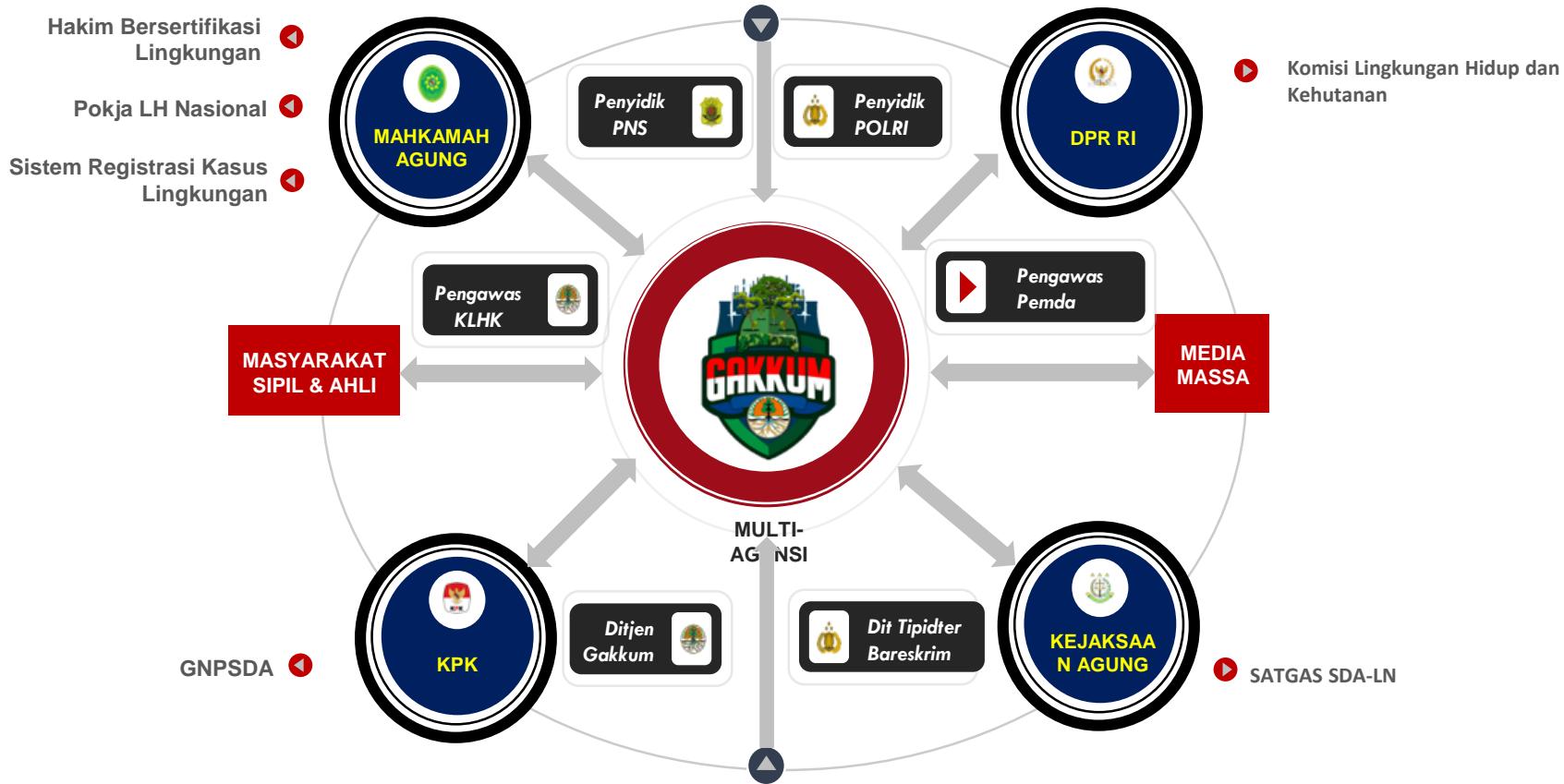
Ratas Karhutla (12 Agustus 2016)

“ *Yang namanya penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas. Baik itu administratif, baik itu perdata, baik itu pidana, lakukan tegas siapapun pemiliknya. Tahun-tahun kemarin sudah banyak yang terkena penegakan hukum, sehingga kita harapkan menimbulkan efek jera baik itu perusahaan maupun perorangan*

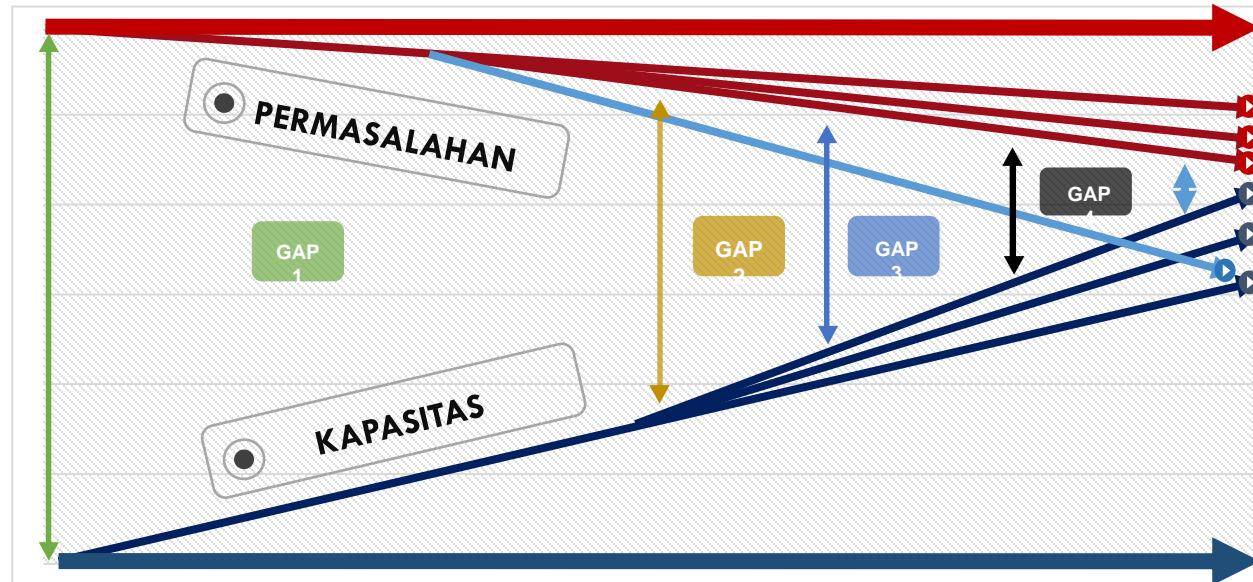
Presiden Joko Widodo

Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 (6 Februari 2020)

II. KELEMBAGAAN: MULTI PIHAK



II. TANTANGAN: OPERASIONALISASI PENEGAKAN HUKUM



KUALITAS SUMBER DAYA
KAPASITAS SUMBER DAYA

**KAPASITAS "CRITICAL MASS"
DAN KUALITAS PENINDAKAN**

GUGATAN PERDATA
GUGATAN TUN
GUGATAN PRAPID

III. STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERINTEGRASI



PENGUATAN KOLABORASI



KOLABORASI ANTAR KEMENTERIAN/EMBAGA



KOLABORASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN PEMERINTAH DAERAH



KOLABORASI DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL



KOLABORASI DENGAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO)



PENGUATAN MULTI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM



PENCEGAHAN



PENGAMANAN KAWASAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN



PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF



PENYELESAIAN SENGKETA LH



PENEGAKAN HUKUM PIDANA



PENGUATAN EKOSISTEM PENEGAKAN HUKUM



SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA



SISTEM DUKUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN



SISTEM KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA



SISTEM PERADILAN



INOVASI TERUS MENERUS “CONTINUOUS INNOVATION”



KERJA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

10 SEP 2020 - 13 OKT 2020

**5,080**

Penanganan Pengaduan

5,656

Pengawasan Izin

1,482

Sanksi Administratif

152

Kesepakatan

26

Gugatan

911

P-21

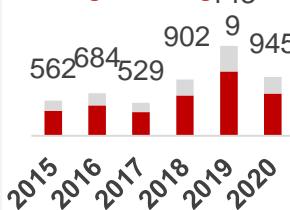
210

Fasilitasi Polisi & Jaksa

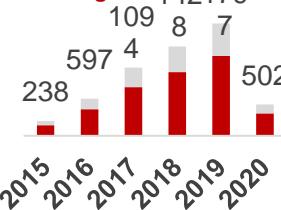
1,441

Operasi

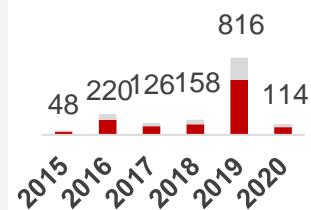
Penanganan Pengaduan



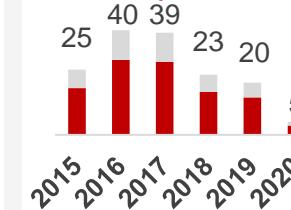
Pengawasan Izin



Sanksi Administratif

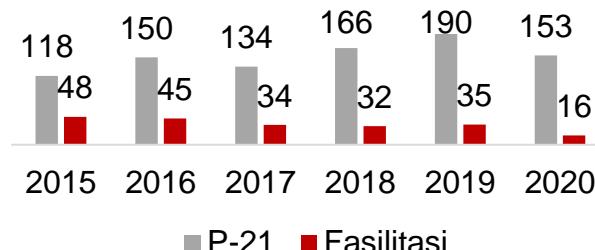


Kesepakatan



85
8

Hakim Bersertifikasi Lingkungan



GUGATAN PERDATA

13
Inkracht

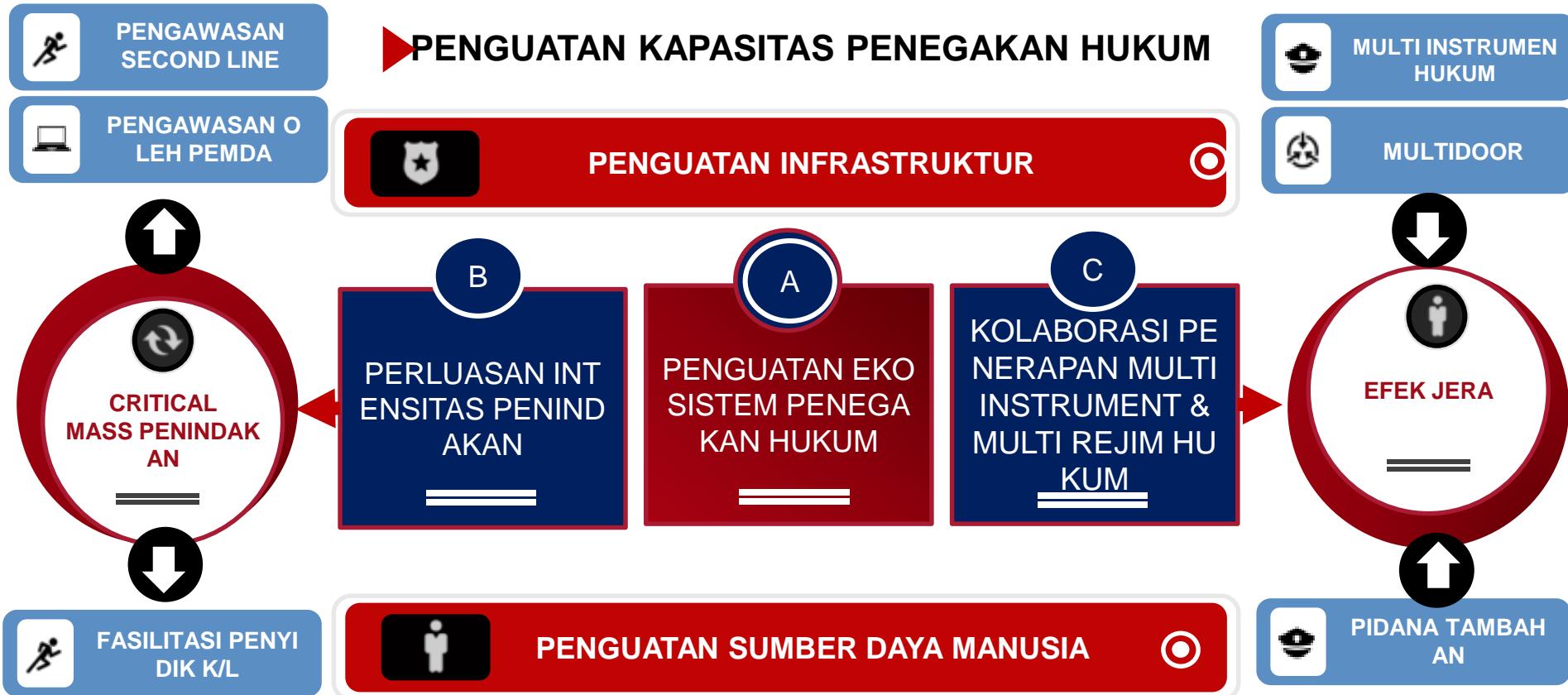
19.4

Rp Triliun
Nilai Putusan

19.3

Rp Triliun
Belum Eksekusi

KERJA GAKKUM KLHK KE DEPAN



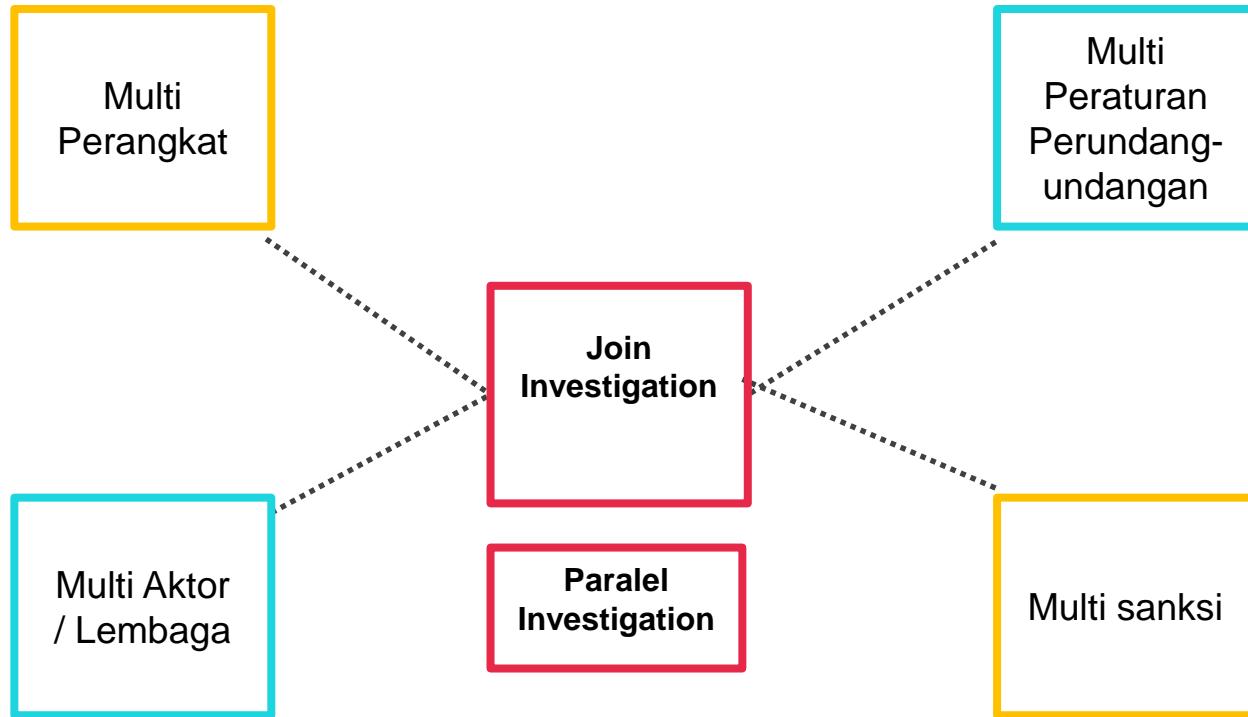
IV. EKOSISTEM PENEGAKAN HUKUM: PERAN SAINS & TECH DALAM PENEGAKAN HUKUM LHK





KERJA GAKKUM KOLABORATIF DENGAN PENDEKATAN MULTIDOOR

KONSEP MULTI APPROACH



PENDEKATAN MULTIDOOR



Menghindarkan disparitas tuntutan pidana dalam perkara sejenis



Menghindari peluang lolosnya pelaku pidana



Pemulihan aset negara jeaging aktor yang berlapis / afiliasi kor elasi dengan tindak pidana lain (TPPU, korupsi, dll)



Efek jera



Menuntut pertanggungjawaban korporasi



Pengembalian kerugian negara (*asset tracing*)



Pemulihan lingkungan hidup

PENERAPAN MULTIDOOR PADA KASUS TPLHK

| No | TEMPUS | KASUS | LOKASI | K/L | STATUS |
|----|--------|---|---|-------------------------|--|
| 1 | 2019 | Kegiatan reklamasi di Desa Air Saga tanpa Izin Lingkungan dan Perusakan Mangrove | Kab. Belitung, Prov. Kepulauan Bangka Belitung | KLHK, ATR/BPN, KKP | <ul style="list-style-type: none">Sudah dilakukan pemasangan papan peringatan bersama dengan 3 kementerian terkait.P.19 |
| 2 | 2019 | Kegiatan reklamasi di Pantai Marita Sari dan Pulau Tegal Mas tanpa Izin Lingkungan dan Perusakan Terumbu Karang | Kab. Pesawaran, Prov. Lampung | KLHK, KPK, ATR/BPN, KKP | <ul style="list-style-type: none">Pemasangan papan peringatan bersama 3 kementerianProses Penyidikan |



PENERAPAN MULTIDOOR PADA KASUS TPLHK

| No | TEMPUS | KASUS | LOKASI | K/L | STATUS | KET |
|----|--------|---|--|------------------|----------|--|
| 3 | 2019 | Pembalakan liar dengan modus operandi melakukan penebangan, pemungutan dan pemanenan tanpa izin di dalam hutan yg dilakukan oleh tersangka H. Agus (kayu ebony) | Pelabuhan Nilam Tanjung Perak, Surabaya Jawa Timur | KLHK dan Bakamla | Inkracht | Vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan pidana denda 2,5 Milyar subsider 1 bulan |
| 4 | 2019 | Pembalakan liar dengan modus operandi melakukan penebangan, pemungutan dan pemanenan tanpa izin di dalam hutan yg dilakukan oleh tersangka Hendra (kayu ebony) | Pelabuhan Nilam Tanjung Perak, Surabaya Jawa Timur | KLHK dan Bakamla | Inkracht | Vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan pidana denda 2,5 Milyar subsider 1 bulan |



PENERAPAN MULTIDOOR PADA KASUS TPLHK

| No | TEMPUS | KASUS | LOKASI | K/L | STATUS | KET |
|----|--------|---|-------------------------|---------------------------|--|--|
| 5 | 2018 | Pengangkutan Kayu tanpa disertai Doku men SKSHH menggunakan Kapal Layar Motor Harapan 8 | Perairan Selat Makassar | KLHK dan Ditjen Bea Cukai | Inkracht | Vonis 2 tahun penjara dan pidana denda 500 juta subsider 6 bulan |
| 6 | 2018 | Pengangkutan Kayu tanpa disertai Doku men SKSHH menggunakan Kapal Layar Motor Mutiara Biru | Perairan Selat Makassar | KLHK dan Ditjen Bea Cukai | Inkracht | Vonis 2 tahun penjara dan pidana denda 1 Milyar subsider 3 bulan |
| 7 | 2019 | Pengangkutan Kayu tanpa disertai Doku men SKSHH menggunakan Kapal Layar Motor Harapan Mekar I | Perairan Selat Makassar | KLHK dan Ditjen Bea Cukai | Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Palu | |



PENERAPAN MULTIDOOR PADA KASUS TPLHK

| NO | TEMPUS | KASUS | LOKASI | K/L | STATUS |
|----|--------|---|--|--------------------|---|
| 8 | 2018 | Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk kegiatan pertambangan | Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung | KLHK, ATR/BPN | Kasus yang ditangani oleh Penyidik LHK sudah P.21 |
| 9 | 2018 | Kegiatan pembangunan hotel baru tanpa dokumen lingkungan | Kab. Manggarai Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur | KLHK, ATR/BPN, KKP | Telah melakukan pemeriksaan saksi |



PENERAPAN MULTIDOOR PADA KASUS TPLHK

| No | TEMPUS | KASUS | LOKASI | K/L | STATUS | KET |
|----|--------|---|------------------------|---------------------|--|--|
| 10 | 2017 | Kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin | Prov. Sumatera Selatan | KLHK dan Kejak saan | P.31 (Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)) | Pengembangan penyidikan (TPPU) |
| 11 | 2017 | Pembalakan liar di dalam kawasan hutan (perseorangan) | Prov. Sumatera Selatan | KLHK dan Kejak saan | Penyidikan lanjutan oleh Jaksa sesuai amanat Pasal 39 UU No 18 Tahun 2013 (inkracht) | Vonis 2 tahun 6 bulan penjara dan pidana denda Rp. 500 Juta subsider 4 bulan |
| 12 | 2017 | Pembalakan liar di dalam kawasan hutan (korporasi) | Prov. Sumatera Selatan | KLHK dan Kejak saan | Pengembangan Penyidikan pengenaan korporasi (inkracht) | Vonis pidana denda Rp. 5 Miliar |



DOKUMENTASI KEGIATAN MULTIDOOR







WE FIGHT AGAINST X-CRIME



Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 4,
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta



ditjengakkum@menlhk.go.id



www.gakkum.menlhk.go.id



(021) 5790 2925

DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA

TERIMA KASIH